

**EFEKTIVITAS KERJA APARAT DESA  
(STUDI KASUS DI DESA PAKUUE DUA KECAMATAN TENGA KABUPATEN  
MINAHASA SELATAN)**

**JOHANES F.L RAMPI**

**JOORIE. M.RURU**

**NOVIE R. A. PALAR**

*Abstract*

*This research is done for the purpose of explaining the effectiveness of village personnel in the village of Pakuure two Tenga district of South Minahasa Regency in the study of public administration. The study uses qualitative approach methods. The subject of this study amounted to 10 of the one occupying the research site so researchers took the conclusion to give the Kuisoner to the 10 subjects. . Data collection using interviews, observations, behavioral studies (documentation), while the analytical techniques used are qualitative data analysis interaction models Miles and Huberman and Sugiono. The results of the study showed (a) more productivity is realized in the implementation of non-physical development and less attention to the empowerment and strengthening of economic potential of the village community. (b) The creativity of the village apparatus is formed in establishing a working relationship with the district and district governments as well as in conjunction with religious leaders but lack creativity in presenting the government program to Improving people's living standards. (c) The working intensity of the village apparatus is manifested in the division of work and seeks to optimally serve the community. However, the intensity of work produced as a form of occupational effectiveness has not been followed by the involvement and support of the community.*

*Keywords: effectiveness, work effectiveness, village apparatus.*

**PENDAHULUAN**

Desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya dipercayakan kepada kepala desa beserta perangkat pemerintahannya. Hal ini sejalan dengan amatan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala desa dan aparat desa lainnya diberi kewenangan dan tanggungjawab untuk menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan administrasi.

Berpijak pada tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan yang ada sebagaimana fungsinya, maka diperlukannya pelaksanaan kerja dalam setiap tahun melalui rencana kerja pemerintah desa. Rencana kerja pemerintah desa disusun berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Oleh karenanya maka dalam menjalankan fungsinya, pemerintah desa perlu untuk dapat melaksanakan setiap program kerja yang ditetapkan setiap tahun sebagaimana tertuang dalam rencana kerja pemerintah desa.

Capaian kerja sebagaimana rencana kerja pemerintah desa perlu dilakukan secara efektif dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki oleh semua aparat desa serta adanya dukungan dari masyarakat dan pemerintah kecamatan maupun kabupaten. Untuk dapat menjadikan program kerja tercapai secara efektif memang tidaklah mudah. Sebab fakta lapangan menunjukkan bahwa dari aspek kemampuan kerja, aparat desa yang ada tidak semuanya memiliki pengalaman kerja yang sama pada semua aparat desa. Demikian pula halnya dengan waktu penyelesaian kerja, pada situasi ini sebagian besar aparat desa memiliki pekerjaan lainnya yang merupakan pekerjaan utama mereka seperti petani, pedagang, wisausaha maupun lainnya. Fakta lainnya juga yang banyak berkaitan dengan

efektivitas kerja yaitu berkaitan dengan kepuasan kerja yang dirasakan oleh masing masing aparat desa. Hal ini terjadi karena ada aparat desa yang mau untuk

mengabdikan diri menjadi aparat di desa didasarkan karena sukarela untuk memajukan desa, sementara ada yang mau menjadi aparat desa untuk prestise dan ad yang mengejar penghasilan tambahan. Situasi ini menjadi bagian yang juga berkaitan dengan upaya pencapaian kerja

Efektivitas" yang sebenarnya berasal dari kata "Efek", yang dalam pengertian sebagai terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. (Liang Gie, 2000 : 11). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1993:250) Efektivitas diartikan sebagai sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya), dapat membawa hasil, berhasil guna (tindakan) serta dapat pula berarti mulai berlaku (tentang undang-undang/peraturan). Menurut Gibson (1996:30) pengertian efektivitas merupakan Penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Riggs (1988:309) bahwa, "Efektivitas lebih mengacu pada jangkauan tujuan yang akan dicapai". Sedangkan Robins (1994:53) mengemukakan konsep efektivitas dengan menyatakan bahwa, "Keefektifan didefinisikan sebagai sejauhmana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya".

Konsep efektivitas yang dikemukakan oleh Steers (1985:1) bahwa sulit sekali memperinci apa yang dimaksud dengan konsep efektivitas itu sendiri. Bagi seorang ahli ekonomi atau analisis atau analisis keuangan, efektivitas adalah keuntungan atau laba investasi. Bagi seorang manajer produksi, efektivitas seringkali berarti kuantitas atau kualitas keluaran (*output*) barang atau jasa. Bagi seorang ilmuwan bidang riset, efektivitas dijabarkan dengan jumlah paten, penemuan atau produk baru suatu organisasi. Dan bagi sejumlah sarjana ilmu sosial, efektivitas seringkali ditinjau dari sudut kualitas kehidupan pekerja.

Konsep efektivitas menurut Hersey dan Blanchard (1995:138-139) bahwa efektivitas menggambarkan keadaan internal

atau predisposisi seseorang atau kelompok dan karenanya bersifat sikap. Apabila orang-orang hanya mementingkan keberhasilan, mereka cenderung mengutamakan kuasa posisi mereka dan menerapkan supervisi yang ketat. Tetapi, apabila mereka efektif, mereka juga akan bergantung pada kuasa pribadi dan menerapkan supervisi yang lebih longgar. Kuasa posisi cenderung didelegasikan ke bawah melalui struktur organisasi, sedangkan kuasa pribadi dialirkan ke atas dari bawah melalui kesukarelaan pengikut. Pendapat yang dikatakan oleh Paul Hetrsey dan Kent Blanchard (1995 : 138) dimana Efektivitas adalah pada dasarnya ditentukan oleh apapun yang diputuskan oleh manager dan organisasi sebagai tujuan dan sasaian mereka, akan tetepi harus diingat bahwa efektivitas adalah fungsi dari : Variabel-variabel keluar; Variabel antara (kondisi SDM); Tujuan Jangka Pendek dan Tujuan Jangka Panjang.

Adapun konsep efektivitas menurut Rosenblom dan Robert (2005:360) bahwa *In this contex effectiveness will focus on the process of implementation, the organization of the effort to implement the policy follow the principles of effective management with regard to (1) structure, (2) personnel, (3) budgeting, (4) decision making, and so on.* Sedangkan Koontz dan O'Donnell sebagaimana dikutip dalam Thompson, (1990:575) mengemukakan konsep efektivitas yang menyatakan bahwa *Suggest that the following principle determine the potential effectiveness of policies in relation to strategy implementation : (1) policies should reflect objectives, (2) policies should be consistent, (3) policies should be flexible, (4) the extent to which a policy is mandatory, (5) policies should be communication, taught and understood, (6) policies should be controlled.*

Makmur (2011) mengemukakan bahwa persoalan efektivitas sebenarnya tidak terbatas pada keadaan yang bersifat konstitusional saja melainkan terdapat

kepada seluruh aspek kehidupan manusia dengan berbagai atributnya. Sebagaimana kita telah sebutkan di atas bahwa salah satu kriteria dari administrasi sebagai suatu ilmu pengetahuan adalah efektivitas yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan kriteria lainnya, yaitu rasionalitas dan efisiensi. Ketiga kriteria ini merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dalam rangka keberhasilan dari berbagai rangkaian kegiatan manusia dalam sebuah organisasi baik dari segi pemerintahan maupun dalam dunia bisnis. Dari segi kriteria efektivitas, unsur-unsurnya antara lain:

- a. Ketepatan penentuan waktu. Sebagaimana kita maklumi bahwa waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Demikian pula halnya akan sangat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi, penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya..
- b. Ketepatan perhitungan biaya. Setiap pelaksanaan suatu kegiatan baik yang melekat pada individu, kegiatan yang melekat kepada organisasi maupun kegiatan yang melekat pada negara yang bersangkutan. Ketepatan dalam pemanfaatan biaya terhadap suatu kegiatan, dalam arti bahwa tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan itu dapat diselesaikan. Demikian pula sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai kegiatan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan hasilnya memuaskan semua pihak yang terlibat pada kegiatan tersebut. Ketepatan dalam menetapkan suatu satuan biaya merupakan bagian dari pada efektivitas.
- c. Ketepatan dalam pengukuran. Ketepatan ukuran yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas yang dipercayakan kepada kita adalah merupakan bagian dari keefektivitasan. Hampir semua kegiatan di mana dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran dari pada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab setiap manusia dalam sebuah organisasi.
- d. Ketepatan dalam menentukan pilihan. Kesalahan dalam memilih suatu pekerjaan, metode, benda, sahabat, pasangan, dan lain sebagainya berarti tindakan yang dilakukan itu gambaran ketidakefektivan serta kemungkinan menciptakan penyesalan di kemudian hari. Sebaliknya bahwa ketepatan memilih suatu kebutuhan atau keinginan akan memberikan kebahagiaan bagi manusia yang bersangkutan dalam perjalanan kehidupannya.
- e. Ketepatan berpikir. Ketepatan berpikir akan melahirkan keefektivan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.
- f. Ketepatan dalam melakukan perintah. Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satu tuntutan kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan kepada bawahan yang tidak dapat dimengerti atau dipahami, maka pelaksanaan perintah tersebut akan dipastikan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam pelaksanaannya serta akhirnya akan merugikan organisasi yang bersangkutan.
- g. Ketepatan dalam menentukan tujuan. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.
- h. Ketepatan menetapkan sasaran. Jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka

akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Upaya untuk mejelaskan mengenai efektivitas juga dapat ditelaah dari pemikiran Gibson et al (1996:32) mengemukakan adanya lima hal pokok yang menjadi ukuran efektivitas, yaitu :

1. Produksi : Yaitu mengacu pada ukuran output utama organisasi baik menyangkut jumlah, maupun kualitas keluaran yang dibutuhkan lingkungan.
2. Efisiensi : Yang mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya organisasi.
3. Kepuasan : Yaitu menunjukkan tingkat dimana organisasi memenuhi kebutuhan karyawan/anggotanya.
4. Adaptasi : Yaitu tingkat dimana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal atau mengacu pada kemampuan manajemen, merasakan perlunya perubahan dalam organisasi.
5. Pengembangan : Yaitu kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mengijadapi tuntutan lingkungan atau mengukur tanggung jawab organisasi dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang.

Kriteria efektivitas ini sebagaimana dikemukakan oleh Hamijoyo (1995:405); Laksamana (2011:39) adalah :

- 1) produktivitas, jumlah hasil yang dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik pelayanan dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*).
- 2) Tingkat atau derajat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
- 3) Kreativitas, artinya penciptaan produk dan hubungannya kondisi yang kondusif

dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.

- 4) Intensitas, artinya memiliki intensitas ketaatan yang tinggi dalam tingkatan tertentu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

#### **Tugas dan Fungsi Aparat Desa**

Adapun yang merupakan tugas pokok dan fungsi aparat Desa dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kepala Desa

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
2. Mengajukan rancangan peraturan Desa
3. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
5. Membina kehidupan masyarakat Desa
6. Membina ekonomi desa
7. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
8. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Desa

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
2. Fungsi :
  - a. Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
  - b. Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan

- c. Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
- d. Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
- e. Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- f. Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Kepala Urusan Umum

1. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.
2. Fungsi :
  - a. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
  - b. Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa
  - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
  - d. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
  - e. Pengelolaan administrasi perangkat Desa
  - f. Persiapan bahan-bahan laporan; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Kepala Urusan Keuangan

1. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.
2. Fungsi :
  - a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa
  - b. Persiapan bahan penyusunan APB Desa; dan
  - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Kepala Urusan Pemerintahan

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.
2. Fungsi :
  - a. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
  - b. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
  - c. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
  - d. Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa
  - e. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa
  - f. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
  - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.

Administrasi Pemerintahan Desa :

1. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
3. Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga Desa yang berkehidupan ekonomi kurang mampu agar mendapatkan penangguhan-penangguhan. Misalkan penangguhan atau pengurangan beban biaya di rumah sakit. Pembuatan surat ini tidak memerlukan biaya, digratiskan bagi warga Desa yang memerlukan. Dalam perkembangannya SKTM ini berubah menjadi Kartu Multiguna, Kartu ini dapat digunakan oleh satu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga sebagai pemegang kartu

## **METODE PENELITIAN**

Desain yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif (Moleong, 2000 : 85). Penggunaan desain penelitian kualitatif sesuai dengan karakteristik permasalahan yang ada yaitu secara langsung terlibat dilokasi penelitian melalui pengamatan langsung dalam mengungkapkan dan menjelaskan tentang efektivitas kerja aparat desa yang ada di Desa Pakuure Dua Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan.

Pemilihan desain kualitatif ini juga lebih menekankan pada segi proses dan bersifat eksploratif yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan pengamatan secara empirik, untuk menemukan apa permasalahan mendasar yang menyebabkan munculnya masalah efektivitas kerja aparat desa itu muncul dan berusaha mencari formula yang tepat untuk menjawab atau mengatasi permasalahan tersebut. Hakekat dari penelitian eksploratif ini adalah suatu upaya dalam pemecahan masalah dengan jalan mencari, menemukan dan mengatasi atau mencari solusi melalui peristiwa-peristiwa yang ada berdasarkan fakta yang ada di lapangan yang merupakan penggambaran abstrak permasalahan.

### **Lokasi dan Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Pakuure Dua Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan. Alasan pemilihan lokasi penelitian lebih didasarkan pada objek permasalahan dimana permasalahan efektivitas kerja aparat desa menjadi sorotan sampai dengan saat ini disebabkan oleh karena dalam pelaksanaan tugasnya didanai oleh anggaran yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD). Selain itu pula guna mempermudah proses penelitian, dimana peneliti memahami latar dan kondisi lokasi penelitian.

### **Fokus Penelitian**

Dalam upaya menjawab masalah penelitian maka diperlukan menetapkan fokus agar penelitian akan terarah pada upaya pemecahan masalah. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu :

1. Produktivitas
2. Kreativitas
3. Intensitas

### **Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari informan yang diwawancarai secara langsung oleh informan di lokasi penelitian. Sumber data berupa informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan warga masyarakat maupun pemerintah desa sehubungan dengan upaya untuk menjelaskan efektivitas kerja aparat desa di Desa Pakuure Dua Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan.

Adapun informan yang diwawancarai sebanyak 10 orang yang adalah sebagai berikut :

- a. Hukum Tua : 1 orang
- b. Sekretaris Desa : 1 orang
- c. Kepala Jaga : 2 orang
- d. Meweteng : 1 orang
- e. Masyarakat : 6 orang

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku, arsip, karya tulis, koran dan jurnal yang berkaitan dengan upaya mendapatkan data dan fakta guna menjelaskan efektivitas kerja aparat desa di Desa Pakuure Dua Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan.

### **Instrumen Penelitian**

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif lebih banyak tergantung pada diri peneliti sebagai alat pengumpul data, dengan instrumen penelitian utama adalah peneliti sendiri. Peneliti dilapangan melakukan pengamatan dan wawancara dengan informan, sebelumnya mempersiapkan dan membekali diri dengan kemampuan

melakukan pengamatan dan pengetahuan tentang objek dan lokasi penelitian guna mempermudah peneliti menjelaskan efektivitas kerja aparat desa di Desa Pakuure Dua Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditunjukannya pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Maria Eni Surasih, 2006:23). Dengan memahami hal ini maka menjadi nyata bahwa pemerintah desa memiliki tanggungjawab untuk menghadirkan program pembangunan yang mengarah pada peningkatan taraf hidup masyarakat yang ada di desa. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh data dan informasi bahwa Pemerintah Desa Pakuure Dua Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan banyak memfokuskan pelaksanaan pembangunan di sektor fisik. Hal ini sesuai dengan data yang ada bahwa pelaksanaan pembangunan dari pemerintah desa di tahun 2019 yaitu pada Pembangunan Drainase, Perintisan Jalan, Pembangunan Talud, Pemasangan Paving Keliling Lapangan Sepak Bola dan Pengadaan Lampu Jalan Lorong – Lorong merupakan produk yang dihasilkan oleh aparat desa dan kegiatan posyandu merupakan salah satu kegiatan non fisik yang bersifat pemberdayaan potensi masyarakat.

Memperhatikan potensi desa yang mayoritas adalah petani seharusnya pemerintah juga dapat menghadirkan pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan penguatan potensi desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Pakuure Dua. Pemerintah desa yang secara konseptua sebagai penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan

pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Guna mengatur hal tersebut maka Kepala Desa memiliki kewajiban akan tetapi juga kewenangan untuk menghasilkan produk pembangunan sebagaimana kebutuhan desa dan memaksimalkan potensi desa.

Organisasi pemerintahan desa yang meliputi kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana Pasal 48 UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan Pasal 61, PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa menyatakan bahwa perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Sehingga untuk dapat menjalankan tugas sebagai aparat desa secara efektif maka semua komponen harus difungsikan dengan baik.

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan kekuasaan pengelolaan kekuasaan dan aset desa seharusnya dapat dengan lebih bijaksana menetapkan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan keseimbangan antara pembangunan fisik dan non fisik.

Untuk dapat melaksanakannya maka diperlukan kerjasama dengan semua aparat desa, membangun hubungan yang baik dengan Badan Perwakilan Desa akan tetapi juga dapat membangun hubungan kerja sama dengan semua kompeten masyarakat Desa pakuure Dua. Hukum Tua yang diberi kewenangan untuk menetapkan peraturan desa dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa dapat memanfaatkan juga

untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang lebih baik.

Sekalipun secara umum dapat dikatakan bahwa pemerintah Desa Pakuure Dua telah efektif dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya yang terlihat dari produktivitas kerja. Asumis ini dapat dibuktikan dari capaian hasil kerja sebagaimana rencana yang ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi dengan memperhatikan makna yang terkandung pada tanggungjawab untuk mengelola potensi desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih perlu untuk dilakukan perbaikan. Hal ini menjadi penting agar capaian efektivitas kerja bukan hanya pada pembangunan fisik semata akan tetapi juga pada pembangunan pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi, pemanfaatan potensi yang akhirnya dapat menjadikan ekonomi masyarakat meningkat dan rakyat sejahtera.

Efektivitas kerja aparat yang ada di Desa Pakuure Dua Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan dapat dikatakan sangat baik dalam hal kreativitas untuk membina kehidupan masyarakat, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Hal ini terbukti pada hubungan kerjasama yang dibangun dengan pimpinan golongan agama maupun dalam menjaga keamanan di desa. Akan tetapi efektivitas kerja sebagai perwujudan pada kreativitas untuk menyusun program pembangunan dan menterjemahkan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa belum terlihat dengan baik. Pemerintah desa melalui hukum tua yang memiliki tanggung jawab membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini kiranya menjadi perhatian dari Pemerintah Desa Pakuure Dua Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan untuk tahun – tahun kedepan.

Sementara itu dalam hal intensitas kerja aparat desa sebagai perwujudan dari efektivitas kerja, temuan penelitian menunjukkan bahwa intensitas kerja aparat desa terlihat dari waktu dalam melayani masyarakat. Demikian pula halnya bahwa setiap hari telah diatur aparat desa yang menjadi piket di kantor desa untuk melayani masyarakat. Intensitas kerja aparat desa juga terlihat dalam hal bertemu dengan masyarakat sangat tinggi yang dibuktikan dengan keterbukaan aparat untuk melayani masyarakat. Wujud nyata lainnya bahwa pemerintah melalui kepala jaga dan meweteng secara intens melakukan kontrol di wilayah jaga masing – masing.

Bentuk nyata efektivitas kerja aparat desa dalam hal intensitas memberikan makna bahwa aparat desa yang ada di Desa Pakuure Dua Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan telah dapat memberikan diri melalui waktu dalam melayani masyarakat dengan baik. Tindakan yang dilakukan dalam bentuk pembagian kerja, berupaya untuk secara optimal melayani masyarakat sebagai teriman bahwa aparat desa tersebut memiliki tanggungjawab moral yang baik dalam melayani masyarakat.

Intensitas kerja yang dihasilkan sebagai sebuah bentuk efektivitas pekerjaan perlu untuk diikuti oleh keterlibatan dan dukungan dari masyarakat. Sebab sebaik apapun dan seberapa besarpun pengorbanan aparat desa untuk secara intens melayani masyarakat akan tetapi ketika tidak juga didukung oleh peran serta yang baik dari masyarakat, maka akan sangat sulit untuk mencapai pelaksanaan kerja aparat desa sebagaimana yang diharapkan. Oleh karenanya suatu dampak yang ditemukan dari aspek intensitas dimana pencapaian efektivitas kerja aparat desa memerlukan dukungan dan peran serta yang aktif dari masyarakat.

Akhirnya maka dapat dipahami bahwa capaian efektivitas kerja aparat desa haruslah sejalan dengan kewajiban



melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai dengan kewenangannya. Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 18 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakatan desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa. Untuk melaksanakan tugas ini diperlukan susunan organisasi dan manajemen perangkat desa yang memadai agar mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Hal ini menjadi penting karena sebagaimana yang dikemukakan oleh Asnawi Rewansyah (2011) bahwa ada lima fungsi utama pemerintah desa yaitu fungsi pengaturan/regulasi, fungsi pelayanan kepada masyarakat, fungsi pemberdayaan masyarakat, fungsi pengelolaan asset/kekayaan dan fungsi pengamanan dan perlindungan. Sehingga capaian efektivitas kerja aparat desa harus dilihat secara menyeluruh sebagaimana amanat kebijakan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah desa.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas kerja aparat desa di Desa Pakuure Dua Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan terwujud pada produktivitas, kreativitas dan intensitas. Adapun capaian produktivitas, kreativitas dan intensitas aparat yang ada di Desa Pakuure Dua Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan sebagai berikut :

- a. Produktivitas kerja lebih banyak terwujud dalam pelaksanaan pembangunan non fisik dan kurang memperhatikan aspek pemberdayaan dan penguatan potensi ekonomi masyarakat desa

- b. Kreativitas kerja aparat desa terbentuk dalam membangun hubungan kerja dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten serta dalam hubungannya dengan pemuka agama akan tetapi kurang memiliki kreativitas dalam menghadirkan program pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- c. Intensitas kerja aparat desa terwujud dalam pembagian kerja dan berupaya untuk secara optimal melayani masyarakat. Akan tetapi intensitas kerja yang dihasilkan sebagai sebuah bentuk efektivitas pekerjaan belum diikuti oleh keterlibatan dan dukungan dari masyarakat.

### Saran

Berdasarkan simpulan maka disarankan beberapa hal guna perbaikan masalah baik secara akademis maupun praktis yaitu :

- a. Memperbaiki perencanaan kerja dengan cara memasukkan juga program pembangunan yang dapat meningkatkan potensi dan penguatan pemberdayaan masyarakat seperti dalam sektor pertanian dan peternakan.
- b. Lebih kreatif dalam menghadirkan program pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti dalam pemanfaatan potensi ibu – ibu rumah tangga dan generasi muda.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menunjang program pemerintah dengan cara membangun opini dalam masyarakat bahwa masyarakat sebagai bagian utama dari pembangunan desa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bawata, N.C, Ruru, J. M. dan Londa V. 2019. Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Lilang Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara.

- Manado : Jurnal Administrasi Publik Volume 5 Nomor 72 Tahun 2019. [ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id).
- Bernardine, John H., and Joyce E.A. Russel. 1993. *Human Resources Management : an Experiential Approach*. New York: Me Graw-Hill Inc.
- Bungin, Burhan H.M. 2005. Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gibson L. James, John M. Ivanvovich dan James H. Donnely Jr.1996. Organisasi dan Manajemen : Perilaku, Struktur dan Proses, ahli Bahasa Djoerban Wahid SH. Jakarta : Erlangga.
- Gomes, Faustino Cardoso, 1995, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Hersey, Paul, Ken, Blanchard. 1995. *Manajemen Perilaku Organisasi : Pendayagunaan Sumber Daya manusia*. Terjemahan Agus Dharma. Erlangga. Jakarta
- Makmur, 2011. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung : Rafika Aditama
- Miles. MB. dan AM. Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis*. California: SAGE Publications Inc
- Moleong, Lexy. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya; Bandung.
- Mokodompit, Y. Tampi, G. dan Londa, V. (2019). Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Desa di Desa Molobog Kecamatan Motongkat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Jurnal Administrasi Publik. 5 (78). <https://scholar.google.co.id/>
- Musung, P. V. Ruru. J. Londa V. Y. 2018. Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi di Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa). Manado : Jurnal Administrasi Publik Volume 4 Nomor 63 Tahun 2018. [ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id)
- Olbata, A. Ruru, J, M dan Palar, N. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Pedesaan di Desa Kauneran 1 Kecamatan Sonder. Jurnal Administrasi Publik. 4 (64). <https://scholar.google.co.id/>
- Robbins, Stephen P. 1994. Teori Organisasi : Struktur, Desain dan Aplikasi. Ahli Bahasa Jusuf Udaya, Lie, Ec. Jakarta: Penerbit Arcan.
- Sandala Fascal Marel, Rorong Arie Junus, Londa Very. 2018. Efektivitas Penggunaan Dana Desa Pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kanawong Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Manado : Jurnal Administrasi Publik Volume 4 Nomor 64 Tahun 2018. [ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id)
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi (Organization Effectiveness) A Behavioral View*. Terjemahan Magdalem Jamin. Jakarta : Erlangga.
- Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta
- The Liang Gie, 2000. Administrasi Perkantoran Modern, Yogyakarta : Liberty
- Thoha Miftah . 2010. Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya,. Jakarta: Rajawali Pers.